REFLEKSI GEMPA BANTUL 2006

Wabup Aktor Utama Kethoprak Mitigasi Gumregah

BANTUL (KR) - Memperingati peristiwa gempa bumi di Bantul 17 tahun silam, tepatnya 27 Mei 2006, Pemkab Bantul menyelenggarakan refleksi gempa Bantul 2006 dengan pentas kethoprak edukasi mitigasi bencana dengan mengambil lakon 'Gemregah', yang akan digelar di lokasi pusat Episentrum Gempa, Potrobayan Srihardono Pundong Bantul, Jumat (26/5) malam.

Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Hermawan ST MT, mengungkapkan kegiatan ini merupakan kerja sama BPBD Kabupaten Bantul bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul dan Forum Komunikasi Kethoprak Bantul (FKKB), bertema 'Lestari Budayanya, Tangguh Bencana Masyarakatnya' bersama Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo sebagai aktor utama.

Kemudian Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih sebagai narasumber utama. Peserta meliputi, Forkompimkab Bantul, Sekda, Asekda, Ketua DPRD, OPD, seluruh Panewu dan Lurah se-Bantul, FPRB Bantul, Forkompimkap Pundong dan lainnya.

Menurut Agus, tujuan peringatan refleksi gempa Bantul 2006 ini untuk mengambil hikmah dari kejadian gempa Bantul 17 tahun silam, bahwa bencana adalah pengingat dari Tuhan YME agar umatnya kembali kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Juga untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan bencana kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan kolaborasi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, pakar atau akademisi, lembaga usaha, masyarakat dan media masa dimana unsur-unsur tersebut memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2006 silam atau tepatnya 17 tahun yang lalu, pukul 05.55 WIB di Kabupaten Bantul telah terjadi gempa bumi dengan magnitude 5,9 SR selama 57 detik.

Meskipun kejadiannya tidak sampai satu menit namun jumlah korban meninggal mencapai 6.234 jiwa, serta ratusan ribu orang luka-luka dan mengungsi.

Kejadian tersebut menjadi salah satu berita bencana paling mengejutkan setelah gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004 dimana Indonesia ternyata memiliki potensi bencana yang dahsyat.

Maka tidak heran jika saat itu berbagai unsur masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri datang ke Bantul untuk membantu korban dikarenakan pemerintah daerah belum memiliki kesiapan untuk menghadapi kondisi bencana separah itu.

Gempa bumi Bantul tahun 2006 pada kenyataannya meninggalkan trauma bagi korban serta cerita pilu bagi generasi mendatang. **(Jdm)-f**

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bupati Minta Lurah Taati Aturan

KR-Istimewa

Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan tanah desa Kabupaten Sleman.

SLEMAN (KR) - Guna mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Kabupaten Sleman, Pemkab Sleman menggelar sosialisasi terkait pemanfaatan tanah desa/kalurahan bagi lurah se-Kabupaten Sleman. Sosialisasi diselenggarakan di aula lantai 3 Setda Kabupaten Sleman pada Kamis (25/5).

Acara dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sleman, Sekda Sleman, Dinas PERTARU, Dinas PMK serta panewu se-Kabupaten Sleman. Hadir sejumlah narasumber sosialisasi, di antaranya dari Biro Hukum DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Satpol PP DIY, dan Penghageng Kawedanan Ageng Panitikisma.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, dalam arahannya menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah desa/kalurahan telah diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Sesuai aturan tersebut, jelas Kustini, meskipun kalurahan memiliki hak untuk memanfaatkan, tapi harus tunduk dan menaati ketentuan Pergub No 34 tersebut.

"Sedangkan dalam hal pemanfaatan TKD oleh pihak ketiga, sewa menyewa harus dilakukan dengan kententuan sesuai Pergub nomor 34 tersebut. Baik perizinannya maupun peruntukannya. Jangan sampai ada yang tidak berizin, apalagi ketidaksesuaian antara Izin dan peruntukan di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut ia meminta lurah dan pamong, serta panewu untuk ikut proaktif, dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam hal pengawasan tanah desa, baik terkait perizinnya maupun peruntukannya, terutama yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Sementara Kepala Biro Hukum DIY, Adi Bayu Kristanto, mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus untuk memberantas praktek mafia tanah di wilayah DIY. Hal ini menurutnya sesuai dengan arahan Gubernur DIY guna mengawasi Pergub DIY No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

"Pengawasan Pergub 34 itu dilakukan oleh Kasultanan, dinas di pemerintahan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan desa," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa sesuai dengan sejumlah regulasi yang ada, TKD tidak bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan. Maka ia meminta kalurahan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan TKD, serta memastikan adanya izin sebelum memanfaatkan TKD.

Senada dengan hal tersebut, Penghageng Kawedanan Ageng Panitikismo, KRT Suryo Satriyanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pengawas yang terdiri dari pemantauan dan penertiban dilakukan oleh pihak kasultanan. Namun pada implementasi tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta kalurahan. "Sesuai Pergub tersebut pengawasan dilakukan minimal satu bulan sekali," jelasnya. **(Has)-f**

BAKESBANGPOL DIY GELAR SINAU BHINNEKA TUNGGAL IKA

Pelajar dan Mahasiswa Kader Kebhinnekaan

DIKENAL kaya budaya dan multikultural, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti layaknya Indonesia mini. Beragam suku tinggal dan hidup sebagai keluarga melalui berbagai pertemuan, seperti ekonomi, budaya dan pendidikan. Keragaman, perbedaan justru menjadi kekayaan DIY dengan kerukunan dan rasa toleransi yang tinggi. Kebhinnekaan telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bingkai keistimewaan.

"Rasa keBhinneka Tunggal Ika ini dinilai sangat penting untuk terus dipupuk dan diaplikasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan dengan keistimewaan DIY oleh generasi muda, pelajar yang bisa menjadi Duta Kebhinnekaan," ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY/F-PDI Perjuangan Eko Suwanto ST MSi dalam kegiatan Pembinaan Karakter bagi siswa SMA/SMK bertajuk Sinau Bhinneka Tunggal Ika, di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial, Jalan Veteran 8 Muja Muju, Umbulharjo Yogya, Kamis (25/5).

Kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY ini diikuti pelajar SMA/-SMK di Kota Yogya dari SMAN 3 Yogya, SMA Muhammadiyah 2 Yogya, SMA Budi Luhur Yogya, SMKN 6 Yogya dan SMK Indonesia/SMF Yogya. Masing-masing sekolah mengirimkan 6 siswa. "Perbedaan menjadikan keragaman yang saling melengkapi," jelasnya.

Sebelumnya para siswa dari berbagai SMA/SMK di Yogya juga menjadi peserta dalam kegiatan serupa yang telah digelar Rabu (17/5), Jumat (19/5) dan dilanjutkan Kamis (25/5), Rabu (31/5) dengan menampilkan 4 (empat) narasumber.

Eko Suwanto membawakan materi pertama mengenai Keistimewaan DIY dengan Topik Bahasan Keistimewaan dalam bingkai kebhinnekaan, pelaksanaan keistimewaan di Yogyakarta dalam konsep kebhinnekaan.

KR-Juvintarto

Djuli Sugiarto SSos MP

Dilanjutkan materi-2 oleh Farkhan Lutfii (Dosen UAD) membawakan materi Kebhinnekaan di Indonesia dengan Topik Bahasan Sejarah dan Pengertian Bhinneka Tunggal Ika, Pelaksanaan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia.

Sedang Materi-3 Toleransi dan Keberagaman dengan Topik Bahasan Toleransi dalam hubungannya dengan penghargaan terhadap suku, agama, ras, gender, Implementasi nilai nilai toleransi dalam kehidupan beragama, suku, ras, gender dibawakan oleh I Gede Edy Purwaka dari PT Satunama Global Konsultan.

Ditutup Materi-4 oleh Karel Tuhehay dari Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa (RPKJ) Satunama membawakan Materi-4 Persatuan dan Solidaritas dengan Topik Bahasan Menumbuhkan Persatuan di sekolah dan Praktik persatuan di sekolah dan luar sekolah.

Rangkaian Sinau Bhinneka Tunggal Ika ini diselenggarakan sebanyak 60 kelas terdiri dari 52 Kelas Siswa dan 8 Kelas Mahasiswa dalam periode Februari-Oktober 2023. Sudah dilaksanakan di Kabupaten Sleman, kemudian Kota Yogya dan akan dilanjutkan di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul," tutur Kabid Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol DIY, Djuli Sugiarto SSos MP kepada *KR* di sela acara.

Dijelaskan kegiatan yang diselenggarakan satu hari selama 7 jam efektif ini dengan metode pemaparan materi dari 4) narasumber. "Ada studi kasus, curah pendapat, tanya jawab, diskusi kelompok dan refleksi bersama. Proses belajar akan difasilitasi 1 orang fasilitator (moderator) yang akan memandu kegiatan belajar mengajar selama satu hari," jelasnya.

Selain untuk Pembinaan Karakter pelajar-mahasiswa dan membentuk kader kebhinnekaan menjadi pelopor atau duta kebhinekaan kegiatan ini juga bertujuan meningkatnya toleransi dan kerukunan sosial di DIY sebagai implementasi nilai-nilai Kebhinnekaan di pelajar/mahasiswa.

"Serta untuk menyusun rumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan kebhinnekaan tunggal ika bagi pelajar /mahasiswa di DIY," jelas Djuli. **(Vin)-f**

KR-Juvintarto

Ketua Komisi A DPRD DIY/F-PDI Perjuangan Eko Suwanto ST MSi saat memberikan materi di depan peserta para pelajar.

KR-Juvintarto

Pelajar SMA/SMK antusias mengikuti Sinau Bhinneka Tunggal Ika yang dihelat Bakesbangpol DIY.